

Model Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik

Rd. Sugara Mochamad Haddad¹, Muhamad Hijran²

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung

Pos-el: sugara91@yahoo.com, muhamadhijran7@gmail.com

Abstrak

Kepemimpinan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengatur sebuah lembaga atau organisasi. Ada banyak ragam gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan karakter kepemimpinan seorang pemimpin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakteristik dan gaya kepemimpinan sunda yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam memimpin Kabupaten Purwakarta. Aspek penelitian lebih spesifik diarahkan pada konteks pendidikan politik. Apakah gaya kepemimpinan politik sunda yang dipraktikkan oleh Dedi Mulyadi memberikan edukasi politik pada masyarakat? Hal tersebut yang menjadi pertanyaan besar dalam penelitian yang telah dilakukan. Karena pada dasarnya seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinannya tidak hanya sebatas mampu memimpin dengan baik tetapi juga harus mampu memberikan edukasi bagi yang dipimpinnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih karena gaya kepemimpinan ini dianggap unik dan jarang dilakukan oleh seorang pemimpin politik. Model kepemimpinan politik sunda yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi secara umum mampu memberikan sebuah edukasi politik bagi masyarakat Purwakarta. Selain itu juga “Kang Dedi” dalam gaya kepemimpinannya mampu memberikan inspirasi bagi masyarakatnya serta secara tidak langsung sekaligus melestarikan kearifan lokal terkait gaya kepemimpinan yang berbudaya Sunda

Kata kunci : *kepemimpinan, politik, sunda, pendidikan, kewarganegaraan.*

Pendahuluan

Kepemimpinan dalam masyarakat terdiri dari kepemimpinan formal seperti pemerintah maupun organisasi dan lembaga politik. Kepimpinan non-formal seperti keberadaan para ulama, tokoh budaya atau tokoh adat. Kepemimpinan nonformal dalam masyarakat Sunda diperoleh dari masyarakat yang bisa bersumber dari integritas sang pemimpin, keahlian, penghargaan, atau hubungan. Sedangkan pemimpin formal diperoleh melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan setiap empat tahun. Masyarakat Jawa Barat memilih gubernur, walikota atau bupati dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun.

Sebagian besar masyarakat di Jawa Barat adalah Masyarakat Sunda. Tipologi suku yang menempatkan laki-laki dalam kepemimpinan lebih menonjol. Salah satu daerah yang kental dengan nilai-nilai sunda adalah Purawakarta. Sistem sosial masyarakat maupun pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat kental dengan nilai sunda seperti Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimistis, ramah, sopan, dan riang. “Orang Portugis mencatat dalam Suma Oriental bahwa orang sunda bersifat jujur dan pemberani” (Wikipedia.org). Sikap-sikap sebagai Orang Sunda turut menentukan bagaimana seorang pemimpin dalam pemerintahan dipilih termasuk di Kabupaten Purwakarta.

Dalam Masyarakat Sunda kepemimpinan tidak hanya bersumber dari proses resmi sebuah demokrasi dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya diinginkan oleh Masyarakat Sunda adalah para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan menampilkan nilai-nilai “*kasundaan*” yang bersumber dari filosofi Masyarakat Sunda.

Dalam naskah Siksakandang Karesian, terdapat sepuluh pedoman yang harus dimiliki serta dilaksanakan pemimpin dalam rangka membina serta memimpin bawahannya, yang dikenal dengan sebutan *dasa prasanta* yang meliputi:

1. pemimpin harus memiliki kebijaksanaan,
2. keramahan yang menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja dan beraktivitas.
3. *hook* (sayang atau kagum), perintah dianggap sebagai representasi kekaguman atas prestasi dari orang yang diperintahnya.
4. *pésok* (memikat hati atau *reueus/bangga*), harus mampu memikat hati bawahannya dan merupakan kebanggaan juga bagi bawahannya.
5. *asih* (kasih, sayang, cinta kasih, iba), perintah harus dilandasi dengan perasaan kemanusiaan yang penuh getaran kasih.
6. *karunya* (iba/sayang/belas kasih), sebenarnya hampir sama dengan asih, tetapi dalam *karunya/karunia* perintah harus terasa sebagai suatu kepercayaan.
7. *mupreruk* (membujuk dan menentramkan hati), *seyogianya* mampu membujuk dan menentram-

kan hati dengan cara menumbuhkan semangat kerjanya.

8. *ngulas* (memuji di samping mengulas, mengoreksi), melalui cara bermacam-macam.
9. *nyecep* (membesarkan hati dan memberikan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati).
10. *ngala angen* (mengambil hati), mampu menarik hati dan simpati sehingga tersambung ikatan silaturahmi yang kental dan harmonis. (www.garutkab.go.id)

Masyarakat Sunda memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan masyarakat lain. Dalam memilih pemimpin, Masyarakat Sunda menginginkan pemimpin yang memiliki pandangan visioner baik tentang pendidikan, ekonomi maupun pada aspek spiritualitas menuju terbentuknya masyarakat madani. Kepemimpinan adalah bagaimana mempengaruhi masyarakat maupun sistem yang ada agar berperilaku menuju pembentukan masyarakat madani.

Salah satu masyarakat yang kental dengan nilai-nilai kasundaan adalah masyarakat Purwakarta. Hal ini tampak dari artefak budaya yang menampilkan nilai-nilai kasundaan seperti patung tokoh pewayangan yang ada di beberapa sudut Kota Purwakarta. Orientasi masyarakat yang memilih pemimpinnya didasarkan pada adanya nilai-nilai kasundaan yang terdapat pada diri pemimpinnya.

Sebagian besar masyarakat Purwakarta berada di pinggiran kota atau di pedesaan. Pada umumnya masyarakat yang tinggal di pinggiran kota atau di pedesaan kurang banyak mendapatkan informasi. Sedangkan arus informasi sangat berpengaruh terhadap cara berpikir suatu masyarakat. Bagi masyarakat desa, cara berpikir termasuk memilih pemimpin lebih didasarkan pada kepribadian atau bersumber dari kharisma. Sebagian masyarakat yang berada di Kota Purwakarta lebih rasional dalam memilih pemimpin. Secara umum karakteristik yang dipilih adalah pemimpin yang kental dengan karakter “urang sunda” seperti Bupati terpilih saat ini yaitu Kang Dedi Mulyadi. Pergeseran paradigma masyarakat dalam memilih pemimpin berhasil dikelola oleh bupati terpilih. Dengan menampilkan nilai-nilai pemimpin yang kuat memegang nilai-nilai sunda, Kang Dedi kembali terpilih untuk masa periode selanjutnya.

Pemimpin yang dipilih masyarakat adalah pemimpin yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Henan (2001, hlm. 15) terhadap beberapa negara seperti dinyatakan bahwa: “*Thus far, the leadership has tended to conduct a strategy of fire-fighting, dealing with problems as they arise, rather than engaging in any type of preventative strategy*”. Sebagai seorang pemimpin dalam kelompok Masyarakat Sunda Kang Dedi berhasil menampilkan dua sosok sekaligus yaitu representasi pemimpin sunda di tengah era modern dan didisisi lain adalah

seorang pemimpin modern dengan visi yang cukup cerdas tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya.

Kepemimpinan dalam politik merupakan fenomena yang cukup menyita perhatian. Pemimpin atau kepala daerah silih berganti seiring dengan proses demokrasi yang berlangsung. Masyarakat memilih kepala daerah berdasarkan pemahaman masyarakat tentang pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin dalam pandangan masyarakat harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat serta memiliki keberanian. Disisi lain masyarakat ada yang memilih kepala daerah berdasarkan pengalaman. Menurut Kouzes dan Posner (2012, hlm. 35) “*For people to follow someone willingly, the majority of constituents believe the leader must be honest, forward-looking, competent, inspiring*”. Maksud dari pernyataan diatas ialah seseorang akan mengikuti pemimpinnya jika konstituennya percaya bahwa pemimpinnya memiliki kejujuran, memiliki pandangan masa depan, kompeten (cakap), menginspirasi pengikutnya. Sejalan dengan pernyataan diatas seorang pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan seseorang dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Efektivitas kepemimpinan dinilai sejauh mana pemimpin dapat mendorong perilaku individu yang ada dalam organisasi menuju pencapaian tujuan.

Fungsi pemimpin adalah mendorong masyarakatnya menuju ilmu pengetahuan termasuk dalam hal berpolitik. Jarang sekali ada pemimpin yang mendorong warganya untuk melek politik. Hal ini mempengaruhi bagaimana kebijakannya terkait pendidikan politik. Seolah-olah kebijakan untuk mendorong warga agar melek politik bukan merupakan ranah seorang pemimpin. Persoalannya politik pun dipersepsikan oleh masyarakat sebagai bidang yang hanya berurusan dengan korupsi, licik, maupun perseteraan. Pada dasarnya pendidikan politik sangat penting dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpolitik. Etika politik dapat dibudayakan dengan adanya pendidikan politik. Jarang pemimpin memiliki kesadaran untuk mendorong kesadaran politik masyarakatnya baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal melalui partai atau lembaga swadaya masyarakat. Kecenderungan untuk memisahkan kepemimpinan dengan upaya membangun kesadaran politik terjadi secara umum. Pemimpin seolah enggan untuk mendorong kesadaran berpolitik warganya.

Adanya kesadaran berpolitik hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan politik. Kesadaran berpolitik akan mendorong partisipasi politik secara optimal. Partisipasi politik memiliki makna yang sangat luas sebagai awal dari keikutsertaan masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah. Partisipasi politik yang didasarkan pada hasil pendidikan politik dapat mengurangi apatisisme sebagian masya-

rakat yang apatis terhadap proses politik yang tidak dilandasi oleh etika politik.

Masyarakat yang sadar secara politik memiliki peran yang strategis sebagai agen-agen perubahan bagi masyarakat. Partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran berpolitik akan mendorong upaya memperbaiki tatanan politik demi kesejahteraan masyarakat. Lemahnya pendidikan politik dan kesadaran pemimpin terhadap pendidikan politik merupakan salah satu wujud demokrasi yang tidak mendidik serta menimbulkan krisis demokrasi karena memunculkan ketidakberdayaan masyarakat akibat kurangnya pendidikan berpolitik. Para pemimpin jarang mendorong pendidikan politik bagi masyarakatnya.

Pendidikan politik ditujukan untuk mempersiapkan anggota masyarakat agar mampu berperan sebagai subjek pembangunan melalui partisipasi politik secara aktif. Pendidikan politik yang mengandung kesatuan antara dimensi ideal dan dimensi manifest prinsip berpancasila dalam partisipasi politik pembangunan daerah diwujudkan oleh seorang pemimpin melalui interaksinya dan kerja nyata seorang pemimpin dengan dan bersama masyarakat. Upaya untuk mendidik masyarakat agar menyadari perannya dalam berpolitik tidak mudah ditengah masyarakat yang menganggap "politik itu kejam".

Pendidikan politik merupakan sebuah proses agar masyarakat memiliki kepekaan terhadap persoalan politik. Kepekaan tersebut mendorong adanya kesadaran masyarakat Purwakarta terhadap dinamika politik yang berkembang di Purwakarta. Mengentengahkan masalah model kepemimpinan politik sunda dalam konteks pendidikan politik merupakan sebuah upaya untuk mendorong permasalahan-permasalahan dalam kaitannya dengan kepemimpinan sunda terangkat sebagai kajian ilmiah sehingga dapat dihasilkan gambaran mengenai kepemimpinan sunda dalam konteks pendidikan politik.

Metode

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif berbeda dengan paradigma penelitian kuantitatif. Peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi instrument utama penelitian yang menginterpretasikan informasi dari sumber penelitian. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell, J.W. dalam Basuki (2006, hlm. 83) mengemukakan penelitian kualitatif yaitu:

'Research that is guided by the qualitative paradigm is defined as: "an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants, and conducted in a natural setting.'

Metode penelitian kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini dibarengi dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maxiiied (Nazir, 2003, hlm. 83) menjelaskan bahwa "penelitian kasus (*case study*) adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas".

Selain itu juga, dalam proses pengumpulan data, dalam penelitian ini terdapat tiga sumber perolehan data yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menguatkan kembali keakuratan data yang telah diperoleh, peneliti melakukan proses pengeuatan terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi data, sumber, dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

Sikap Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai sikap kepemimpinan politik Bupati Purwakarta terlihat jelas bahwa sikap Bupati Purwakarta mampu bersikap sebagai seorang pemimpin yang mampu menjadi panutan bagi rakyatnya. Hal itu sebagaimana terlihat dari setiap wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada setiap narasumber yang mengatakan bahwa Bupati Purwakarta telah mencerminkan sikap sebagai seorang pemimpin dengan karakter *nyunda* nya. Hal tersebut sesuai dengan teori kepemimpinan yang dinyatakan oleh Robbins (alih bahasa Molan, 2006, hlm. 432) yang menyatakan bahwa "kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran". Kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi agar orang lain terinspirasi untuk bertindak sesuai dengan visi seorang pemimpin. Dedi Mulyadi berhasil mempengaruhi masyarakat Purwakarta untuk mewujudkan visi "Purwakarta Berkarakter" dengan melestarikan budaya kesundaan yang merupakan budaya leluhur masyarakat Purwakarta. Hal itu terbukti dimana saat ini masyarakat Purwakarta seperti menyatu kembali dengan budaya sunda yang dulu sempat hilang. Ditambah lagi dengan banyaknya ciri khas kebudayaan sunda yang kembali ditampilkan di daerah Purwakarta baik dari bangunan maupun kebiasaan sehari-hari. Dedi Mulyadi menginginkan Purwakarta memiliki karakter/pembeda dari daerah lainnya, namun meskipun yang ditonjolkan dalam pembangunan adalah kebudayaan sunda tetapi Dedi Mulyadi tidak lantas mendiskriminasi warga pendatang yang ada di Purwakarta yang bukan berasal dari daerah Sunda. Dedi Mulyadi seolah seperti memperkenalkan kepada warga pendatang yang bukan berasal dari daerah sunda untuk sama-sama menjaga dan melestarikan

budaya sunda. Hal itu sesuai dengan filosofi “*urang sunda*” yang *someah ka semah* (ramah terhadap tamu).

Jika kita melihat dari segi efektivitas sikap kepemimpinan Dedi Mulyadi dalam memimpin Purwakarta sangat efektif. Hal itu terbukti dengan tercapainya visi “Purwakarta Berkarakter” yang merupakan ide gagasan Dedi Mulyadi melalui perumusan dan diskusi dengan para ahli. Gaya kepemimpinan sunda efektif diterapkan oleh Dedi Mulyadi sebagai alat untuk mencapai visi “Purwakarta Berkarakter”. Dari segi pembangunan, gaya *nyunda* yang diterapkan Dedi Mulyadi mampu membangun Purwakarta sebagai daerah percontohan bagi daerah lainnya. Hal tersebut sesuai dengan teori Contingency Theory Leadership yang dinyatakan oleh Robins (alih bahasa Molan, 2006, hlm. 441) bahwa “seorang pemimpin akan efektif jika gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang terjadi”. Situasi serta lokasi daerah Purwakarta yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kerajaan Padjajaran yang terkenal dengan pemimpinnya Prabu Siliwangi merupakan daerah yang berkebudayaan dan beradatistiadat sunda. Selain itu faktor pendukung lainnya yang membuat tercapainya visi “Purwakarta Berkarakter” yang diwujudkan dengan gaya *nyunda* adalah saat ini masyarakat Purwakarta seperti seolah kehilangan pakem dalam kehidupan, masyarakat seperti kebingungan mencari budayanya akibat derasnya akulturasi budaya saat ini. Pada saat itu Dedi Mulyadi muncul dengan atribut *nyunda* yang mampu diterima oleh masyarakat. Makna “Purwakarta Berakter” itu sendiri adalah Purwakarta yang mempunyai ciri khas atau perbedaan dari daerah-daerah lainnya. Purwakarta yang memiliki gaya tersendiri dibanding daerah lainnya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam kehidupan sosial, kepemimpinan diberikan karena adanya karakteristik yang dimiliki, Lord dan Maher (Dorfman et al, 2007, hlm. 669) menjelaskan bahwa “*Leadership is a social label given to individual if either their personality, attributes, behaviors sufficiently match the observer's belief about leader or failure to activities of perceived leaders.*” Kepemimpin adalah label sosial yang diberikan pada seseorang yang memiliki kepribadian, atribut, serta kebiasaan yang mencerminkan dirinya sebagai pemimpin. Label sosial yang diberikan masyarakat Purwakarta kepada Dedi Mulyadi tidak terlepas dari kepribadian, atribut serta kebiasaan yang mencerminkan urang sunda. Kepribadian sederhana yang ditampilkan Dedi Mulyadi telah mencirikan sosok orang sunda seutuhnya. Atribut yang dipakai oleh Dedi Mulyadi dengan gaya berpakaian memakai pangsi dan iket telah mencirikan sebagai orang sunda, serta kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Dedi Mulyadi dalam hal kebiasaan memakan makanan yang direbus dan sebagian besar dari tumbuhan (kukuluban) telah mencerminkan sosok orang sunda. Kepemimpinan yang dipercaya oleh pengikutnya memiliki kredibilitas,

integritas, visi, misi serta dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pengikutnya.

Dalam konteks masyarakat sunda dan pendidikan politik, figur pemimpin sunda seperti Bupati Dedi Mulyadi tidak secara eksplisit memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui interaksi dan komunikasi serta peristiwa budaya bupati sebenarnya sedang mengadakan pendidikan politik yang bertujuan agar masyarakat sadar dengan identitasnya sebagai orang sunda. Menjaga lingkungan, mengimplementasikan nilai-nilai budaya sunda, belajar dari alam, serta membangun kemandirian dengan memanfaatkan sumber daya lokal merupakan hak dan kewajiban masyarakat sunda.

Sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek. Dalam penelitian ini sikap kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi tampak jelas sangat positif terhadap pendidikan politik pada aspek pewarisan nilai-nilai budaya sunda baik bagi masyarakatnya maupun para tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah. Sikap seorang pemimpin akan menentukan bagaimana pendidikan politik berlangsung. Dengan adanya sikap positif maka tindakan seorang pemimpin serta motif yang dimiliki pemimpin dalam kaitannya dengan pendidikan politik dapat diidentifikasi. Masyarakat desa memilih pemimpin yang mampu mengayomi dan memberikan ketentraman. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat desa seperti yang dijelaskan Sajogyo (2011, hlm. 24) yang menjelaskan bahwa:

ditinjau dari sudut pandang konflik dan persaingan, masyarakat desa cenderung menghindari konflik dan persaingan yang akan berdampak negatif bagi kehidupan, persaingan dan konflik umumnya terkait dengan persoalan tanah dan agrarian. Sebagian besar masyarakat sunda tinggal di pedesaan.

Sebagai contoh seorang Bupati seperti Dedi Mulyadi yang bersikap positif terhadap budaya sunda akan mendorong agar masyarakatnya berbudaya sunda terutama menampilkan sosok masyarakat yang memiliki kemandirian baik pada bidang ekonomi maupun politik. Bupati Dedi Mulyadi dianggap mampu mengayomi masyarakat Purwakarta dengan gaya *nyunda-nya* yang merupakan cerminan dari masyarakat Purwakarta. Bupati memiliki sikap positif terhadap pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari upayanya untuk membangun kemandirian ekonomi, mendorong kebanggaan identitas sebagai orang sunda, kewajiban untuk meningkatkan produktivitas dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal serta bagi pemilihan pemula agar memilih karena alasan rasional.

Pendidikan politik tidak hanya dipahami sebagai keikutsertaan aktif masyarakat dalam kegiatan maupun peristiwa demokrasi dan politik. Pendidikan politik bagi seorang “Bupati Sunda” (Dedi Mulyadi) adalah kesadaran masyarakat terhadap budaya sunda. Kesadaran tersebut dimanifestasikan dalam bentuk

perilaku sunda yang menunjukkan sosok *cageur*, *bageur*, *maher*, *singer* dan *pinter* yang merupakan filosofi orang sunda dalam hal memilih pemimpin. Melalui sikap yang ditunjukkannya, seorang pemimpin sedang memberikan contoh serta penekanan bahwa sikap terhadap budaya sunda yang tepat adalah seperti dirinya. Pemimpin melalui sikapnya merupakan inspirasi bagi pengikutnya atau masyarakatnya. Dengan gaya yang cenderung transending totaliter Bupati Dedi ingin agar masyarakat memahami budaya sunda seperti dirinya.

Sikap tidak akan terwujud tanpa adanya pengetahuan mengenai nilai-nilai kasundaan serta bagaimana nilai tersebut bermakna bagi masyarakat Purwakarta yang dibesarkan dalam lingkungan budaya sunda. Sikap tersebut menunjukkan keyakinannya terhadap makna kebudayaan sunda. Oleh karena itu melalui simbol-simbol yang menunjukkan sikap positifnya terhadap budaya sunda seperti berpakaian hitam dengan ikat kepala, menyatakan “perang” terhadap makanan modern terutama yang digoreng, membakar wewangian dalam ruangan dan menempatkan kereta kencana sebagai simbol kebesaran raja-raja sunda seolah semakin mengaskan bahwa sikap Dedi Mulyadi yang positif terhadap budaya sunda. Dengan keberadaan sikap tersebut maka setiap interaksi dengan masyarakat ditujukan guna mendorong agar masyarakat memiliki sikap yang sama terhadap kebudayaan sunda termasuk dalam kemandirian sebagai orang sunda.

Melalui sikapnya terhadap nilai-nilai “kasundaan” bupati ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa pemimpin sunda pun patut diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. Dengan sikapnya yang positif terhadap budaya Sunda, Dedi Mulyadi ingin menunjukkan bagaimana kejayaan para pemimpin sunda baik pada jaman kerajaan maupun masa sebelum islam. Melalui sikapnya Dedi Mulyadi ingin menunjukkan bahwa kebudayaan Sunda memiliki konsep tentang kekuasaan termasuk dalam pentas nasional. Oleh karena itu keberadaan budaya sunda serta filosofinya tentang politik dan kekuasaan perlu dipahami oleh orang sunda. Hal ini untuk mendorong berkembangnya kesadaran politik masyarakat serta tampilnya pemimpin-pemimpin sunda dalam pentas nasional.

Melalui sikapnya terhadap nilai-nilai sunda dan pendidikan politik yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat sunda. Dedi mulyadi ingin membangkitkan semangat para tokoh sunda agar berkiprah dalam pentas politik nasional. Dalam lingkungannya terutama kedekatannya dengan para sesepuh (tokoh sunda), bupati ingin mengembangkan fungsinya sebagai agen modernisasi bagi kelompok pribumi dengan mengembangkan perekonomian dan sosial serta pendidikan berdasarkan nilai-nilai sunda.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan penelitian bahwa gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi tidak menerapkan gaya yang khas pada satu gaya. Dalam setiap kesempatannya berinteraksi dengan masyarakat dan simbol sunda yang melekat, Bupati mempraktekan gaya kepemimpinan transformatif. Pada saat menerapkan kebijakan sundanya atau menjawab kelompok masyarakat yang kontra dengan kebijakannya, bupati menggunakan gaya otoriter. Melalui simbol perilaku dan karakteristik kepribadiannya yang ingin dicitrakan sebagai orang sunda yang *bageur*, *singer*, *pinter*, dan *maher*.

Dedi Mulyadi menggabungkan pola atau gaya kepemimpinan transformasional dengan gaya otoriter dalam memimpin Kabupaten Purwakarta. Pola kepemimpinan transformasional dilakukan oleh Dedi Mulyadi dalam sikap atau tindakan perilaku keseharian dengan selalu konsisten dengan gaya nyunda memakai pangsi dan iket. Ucapan Dedi Mulyadi mampu menginspirasi masyarakat yang menjadi lawan dialognya. Setiap ucapan Dedi Mulyadi terdapat nilai-nilai yang terkandung didalamnya terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai kesundaan. Dedi Mulyadi juga mampu mempengaruhi masyarakat untuk kembali menggunakan, menjaga dan melestarikan budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari dari mulai berpakaian hingga soal makanan. Sikap konsisten terhadap nilai-nilai kesundaan yang dicontohkan oleh Dedi Mulyadi kepada masyarakat Purwakarta membuat masyarakat termotivasi untuk menggunakan budaya Sunda dalam segala aspek kehidupan.

Pola kepemimpinan transformasional tidak diterapkan dalam seluruh aspek kepemimpinan Dedi Mulyadi. Pola kepemimpinan yang dilakukan Dedi Mulyadi dalam hal pembuatan dan penerapan kebijakan adalah pola kepemimpinan otoriter. Terlihat dari setiap kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi yang seperti tanpa kompromi. Pendirian patung-patung yang ada di Purwakarta adalah salah satu kebijakan Bupati Purwakarta. Pendirian patung tersebut dilakukan secara spontan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Dedi Mulyadi menganggap bahwa semua masarakat Purwakarta mengerti dan sepaham dengannya atas kebijakan pendirian patung, namun nyatanya tidak. Ada juga msyarakat yang justru menolak kehadiran patung-patung yang ada di Purwakarta. Contoh lain kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi tanpa kompromi adalah pelarangan kantin sekolah. Dampak dari diberlakukannya kebijakan tersebut, banyak para pedagang yang seolah seperti dikhianati oleh Dedi Mulyadi. Mereka mengecam kebijakan tersebut yang seolah merampas mata pencaharian masyarakat Purwakarta.

Pola penerapan kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi yang terlihat otoriter membuat masyarakat kecewa. Karena masyarakat merasa kebijakan tersebut menyengsarakan. Meskipun begitu, dalam

setiap kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi tersirat nilai-nilai kehidupan dari setiap kebijakan yang diterapkannya terutama nilai-nilai kesundaan. Dalam pendirian patung tokoh pewayangan, Dedi mulyadi menginginkan masyarakat Purwakarta belajar dari karakter tokoh-tokoh pewayangan dalam menjalankan kehidupannya. Patung tokoh pewayangan yang paling kontroversial adalah patung Bima. Masyarakat menganggap bahwa patung Bima sebagai bentuk dari pemberhalaan dan dukungan terhadap praktik-praktik mistis. Makna pendirian patung Bima adalah dengan karakter Bima yang selalu berkata jujur, dan saking jujurnya Bima bersumpah jika Bima tidak berkata jujur maka ular yang melilit ditubuhnya akan mematuknya diharapkan asmyarakat Purwakarta menjadi masyarakat yang jujur dalam segala tindakan.

Nilai-nilai lain yang tersirat dalam kebijakan Dedi mulyadi adalah nilai kebersamaan dan menekan gaya hidup konsumtif yang tersirat dalam kebijakan pelarangan pedagang berjualan di sekolah. Dedi Mulyadi mengharapkan dengan tidak adanya pedagang yang berdagang di sekolah, siswa/i dan guru-guru membawa bekal makanan dari rumah dan makan bersama (*papahare*) disekolah pada saat jam istirahat dapat meningkatkan nilai-nilai kebersamaan serta menekan gaya hidup konsumtif di masyarakat. Terlepas dari setiap gaya yang ditampilkan oleh Bupati pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk membangun kesadaran politik mengenai nilai-nilai budaya sunda dan mendorong masyarakat untuk menjaga dan mengimplementasikan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kredibilitas Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan politik terwujud karena adanya kredibilitas seorang pemimpin. Kredibilitas tersebut merupakan landasan bagi terbentuknya kepercayaan konstituen terhadap upaya bupati dalam mengimplementasikan setiap sikap, perilaku serta tindakannya berdasarkan nilai-nilai sebagai pemimpin sunda. Dari berbagai narasumber yang telah diwawancarai menyatakan bahwa Bupati Purwakarta memiliki kredibilitas sebagai seorang pemimpin yang mendorong pendidikan politik bagi masyarakatnya. Kredibilitas dibangun atas dasar komitmen dan kepercayaan seseorang baik terhadap konstituen maupun terhadap apa yang diucapkan. Karakteristik utama seorang pemimpin adalah kredibilitasnya. Pondasi kepemimpinan adalah kepercayaan, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Robbins (2006, hlm. 465) yaitu:

1. Kepercayaan berbasis ketakutan, dianggap sebagai hubungan yang paling rapuh, kepercayaan ini akan berfungsi pada tingkat bahwa hukuman itu mungkin, konsekuensi jelas, hukuman

sesungguhnya dijatuhkan jika kepercayaan dilanggar,

2. Kepercayaan yang didasari pengetahuan berdasarkan informasi yang diperoleh positif,
3. Kepercayaan berbasis identifikasi (kepercayaan paling tinggi) yaitu kepercayaan karena adanya hubungan emosional kedua pihak, saling memahami dan menghargai keinginan pihak lain.

Atribut yang melekat pada dirinya sebagai pemimpin dan tokoh sunda membuat kredibilitasnya dimata masyarakat Sunda maupun tokoh masyarakat Purwakarta semakin meningkat. Kepercayaan masyarakat Purwakarta kepada Bupati Dedi Mulyadi dalam hal membangun pendidikan politik bagi masyarakatnya sangat tinggi. Meskipun baru pada tingkat kepercayaan yang berdasarkan pada ketkutan dan karena informasi yang diperoleh, hal itu merupakan sebuah indikator keberhasilan kredibilitas kepemimpinan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi dikemas melalui safari budaya (*gempungan*) yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi.

Beberapa aspek yang dapat mengetahui kredibilitas seorang pemimpin menurut Wibisono (2006, hlm. 142) adalah “menciptakan nilai, penerapan strategi dan pengembangan modal manusia”. Bupati Dedi Mulyadi dianggap mampu menciptakan nilai, menerapkan strategi, dan mengembangkan modal manusia. Nilai-nilai budaya Sunda yang dipraktikkan oleh Dedi Mulyadi dalam mendorong pendidikan politik membuat masyarakat percaya terhadap kredibilitas Dedi Mulyadi sebagai seorang pemimpin. Strategi yang digunakan oleh Dedi Mulyadi dalam mendorong pendidikan politik masyarakat Purwakarta dilakukan secara bertahap yang merupakan bentuk operasional dari strategi Sunda yaitu malapah gedang. Bupati melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat Purwakarta tidak secara frontal, beliau melakukan secara bertahap melalui media safari budaya dan pembangunan simbol-simbol karakter sunda yang mengandung pesan didalamnya. Salah satu contoh adalah dengan dibangunnya patung Bima disalahsatu sudut Kota Purwakarta. Karakter Bima yang konsisten terhadap ucapannya diharapkan mampu ditiru oleh masyarakat Purwakarta dalam berpolitik. Selain itu pembangunan patung Soekarno dan Hatta di Purwakarta juga merupakan bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta.

Pendidikan politik berkaitan erat pembahasan moral. Moral bersumber dari filosofi Pancasila. Proses pendidikan politik dengan praktek berpakaian sunda, kembali kealam, mandiri dalam mengelola sumber daya lokal merupakan sebuah upaya seorang pemimpin dalam mewujudkan masyarakat yang terdiri dari mahluk yang beradab dan berbudaya. Bupati melalui kebijakan nyunda-nya sebenarnya sedang

melakukan pendidikan politik yaitu memperkenalkan dan menginternalisasikan norma-norma dan nilai-nilai budaya sunda, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bupati adalah role model yang ditiru baik dari cara berpakaian, berperilaku nyunda yang digambarkan “*cageur, bageur, singer, pinter*”. Sebagai *role model* tentu setiap perilaku dan tindakannya menjadi contoh bagi generasi berikutnya yang dengan kemendiriannya tetap mempraktekan nilai-nilai sunda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kredibilitas sangat penting guna mendorong agar orang lain mau dan terinspirasi untuk terlibat dalam perwujudan visi seorang pemimpin. Tanpa adanya kredibilitas sebagai seorang tokoh sunda maka menjadi sulit bagi bupati untuk mewujudkan pendidikan politik agar masyarakatnya berpartisipasi aktif dalam mengimplementasikan nilai-nilai sunda. Dalam naskah Siksakandang Karesian, terdapat sepuluh pedoman yang harus dimiliki serta dilaksanakan pemimpin dalam rangka membina serta memimpin bawahannya, yang dikenal dengan sebutan Dasa Prasanta seperti dinyatakan bahwa:

1. pemimpin harus memiliki kebijaksanaan,
2. keramahan yang menumbuhkan rasa nyaman dalam bekerja dan beraktivitas.
3. *hook* (sayang atau kagum), perintah dianggap sebagai representasi kekaguman atas prestasi dari orang yang diperintahnya.
4. *pésok* (memikat hati atau reueus/bangga), harus mampu memikat hati bawahannya dan merupakan kebanggaan juga bagi bawahannya.
5. *asih* (kasih, sayang, cinta kasih, iba), perintah harus dilandasi dengan perasaan kemanusiaan yang penuh getaran kasih.
6. *karunya* (iba/sayang/belas kasih), sebenarnya hampir sama dengan asih, tetapi dalam *karunya/karunia* perintah harus terasa sebagai suatu kepercayaan.
7. *mupreruk* (membujuk dan menentramkan hati), seyogianya mampu membujuk dan menentramkan hati dengan cara menumbuhkan semangat kerjanya.
8. *ngulas* (memuji di samping mengulas, mengoreksi), melalui cara bermacam-macam.
9. *nyecep* (membesarkan hati dan memberikan kata-kata pendingin yang menyejukkan hati).
10. *ngala angen* (mengambil hati), mampu menarik hati dan simpati sehingga tersambung ikatan silaturahmi yang kental dan harmonis. (www.garutkab.go.id)

Kredibilitas yang dibangun oleh bupati akan mempengaruhi seberapa besar pengaruhnya terhadap

masyarakat. Semakin tinggi kredibilitas yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan apa yang diucapkan akan diikuti. Rasa kagum (*hook*) Dedi Mulyadi terhadap budaya sunda dan masyarakat Purwakarta tidak perlu diragukan lagi. Banyak ide gagasan yang diterapkan Dedi Mulyadi untuk Purwakarta. Selain itu program kerja yang dirpogramkan Dedi Mulyadi untuk Purwakarta merupakan wujud rasa *asih* (cinta kasih) terhadap masyarakat Purwakarta yang terangkum dalam program “9 Tangga Cinta Purwakarta”.

Karakteristik sebagai pemimpin yang *pésok* (memikat hati atau reueus/bangga) ditampilkan dengan penampilan sederhana seorang pemimpin, mampu memikat hati para tokoh sunda (sesepuh) dengan mempraktekan hidup sebagai orang sunda “*baheula*” baik dalam konsumsi makanannya atau dalam berpakaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Dedi Mulyadi, dalam kesehariannya beliau selalu memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang direbus yang merupakan kebiasaan “orang sunda” dan dalam hal berpakaian pun beliau menggunakan pakaian yang bercirikan orang sunda dengan memakai *pangsi* dan *iket* (pakaian khas orang sunda). Hal tersebut merupakan cerminan dari sifat *pesok* (bangga) terhadap budaya sunda. Bupati juga dinilai memiliki jiwa *mupreruk* (membujuk dan menentramkan hati), hal tersebut ditunjukkan dalam sikap dan pembicaraan beliau yang mampu menentramkan hati masyarakat Purwakarta. Walaupun ada sebagian kelompok yang bersikap pesimis dengan kepemimpinan sundanya, masyarakat percaya bahwa Dedi Mulyadi dapat mendorong pendidikan politik bagi warganya terutama kesadaran pada warganya untuk mengimplementasikan budaya sunda dan membangun kemandirian dengan kembali ke alam atau jika meminjam bahasa Dedi Mulyadi adalah bersenyawa dengan alam.

Pola kepemimpinan transformasional yang dilakukan Dedi Mulyadi mampu meningkatkan kredibilitasnya di masyarakat. Kepemimpinan yang berperilaku dan bertindak berdasarkan nilai sunda akan menjadi contoh. Artinya pemimpin mentransformasikan nilai-nilai yang melekat pada dirinya kepada konstituennya. Perilaku *cageur, bageur, pinter dan singer*, coba ditampilkan untuk ditiru oleh pengikutnya. Proses peniruan tersebut tidak berlangsung dalam suatu interaksi yang terus menerus dan didukung oleh media. Bupati Purwakarta menginspirasi bawahannya untuk bertindak, mendorong, menumbuhkan pertimbangan psikis individu sebagai orang Sunda yang memiliki kemandirian misalnya dengan cara beternak (di pedesaan), mengenakan ikat kepala dan berpakaian sebagai orang Sunda. Transformasi tersebut kerap dilakukan baik melalui interaksi dan komunikasi dengan bawahannya/masyarakatnya maupun melalui kebijakan-kebijakannya.

Walaupun terdapat cara-cara yang cenderung otoriter dalam penerapan kebijakannya seperti

menerapkan kebijakan tanpa memberikan pemahaman karena masyarakat dianggap tahu tentang nilai sunda, kecilnya dialog terbuka dengan masyarakat dan lebih banyak menampilkan bukti-bukti dibandingkan dengan dialog, superioritas karakteristik sunda dan sumber daya yang dimiliki oleh pemimpinnya. Pola kepemimpinan otoriter digunakan karena memandang bahwa masyarakat sudah mulai kehilangan fondasi nilai kasundaan dalam kesehariannya. Pola kepemimpinan otoriter dinilai efektif oleh Bupati pada agar perubahan untuk kembali kepada falsafah sunda dan alam dapat dilakukan lebih cepat. Atribut kunci dari pemimpin yang bergaya otoriter adalah instruksi serta hukuman untuk merubah perilaku yang diharapkan dari para bawahannya.

Konsistensi Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa Bupati Purwakarta konsisten dalam mendorong pendidikan politik bagi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan teori dari Afif (2013, hlm. 3) mengenai ciri-ciri kepemimpinan yaitu:

Terdapat ciri-ciri umum yang menentukan kepemimpinan: Empati: menciptakan hubungan yang penuh saling pengertian, Konsistensi: seorang pemimpin yang konsisten akan dihormati dan memiliki kredibilitas, dan hal tersebut sangat penting untuk memperoleh dukungan, menunjukkan sikap kejujurannya, sehingga segala rintangan dapat diatasi bersama-sama, dan tidak dengan cara dihindari, serta dikerjakan dengan sepenuh hati, Memiliki misi dan visi besar dan mengatur langkah yang diperlukan untuk mencapainya, fleksibilitas, komunikasi dan keyakinan yaitu Pemimpin yang percaya pada misi dan visinya dan berupaya bekerja keras menuju ke arah itu akan menjadi motivator dan inspirator

Bupati Purwakarta dinilai konsisten dalam mendorong pendidikan politik bagi masyarakatnya. Dengan menggunakan pola kepemimpinan transformasional Dedi Mulyadi selalu memberikan dan menampilkan nilai-nilai kesundaan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dari setiap ucapan dan perilakunya yang konsisten menyerukan pesan dan makna pendidikan politik bagi warga Purwakarta dengan menggunakan simbol nilai-nilai kesundaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh beliau dalam acara pembekalan *Balad Sahate* (loyalis Dedi Mulyadi) tahun 2012 yang mengatakan bahwa:

Saya menulis artikel di Media Indonesia yang berjudul Prostitusi Politik. Kenapa? Karena inilah 'republik prostitusi' dan saya tidak mau menjadi negara prostitusi yaitu kesini ikut kesana ikut. Kalau nanti pemilihnya jablay pasti akan mendapatkan pemimpin hidung belang. Kalau rakyatnya

jablay maka pemimpinnya hidung belang karena jablay itu hanya mau sama hidung belang, sedangkan hidung belang itu mau sama jablay karena membayar yang sifatnya transaksional.

Ucapan yang dilontarkan oleh Dedi Mulyadi tersebut menunjukkan bahwa seorang Dedi Mulyadi konsisten terhadap pendidikan politik yang dilakukan olehnya, hal itu terbukti dari apa yang diucapkannya yang menyerukan kepada masyarakat Purwakarta agar jangan terlibat dalam "*money politic*", karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa politik uang akan merusak makna demokrasi.

Pendidikan politik dalam arti luas merupakan sebuah proses untuk mendorong kesadaran mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pemimpin yang memiliki sikap positif terhadap pentingnya pendidikan politik akan menyelenggarakan sebuah proses pendidikan politik kepada masyarakatnya baik melalui pendidikan formal (di sekolah) maupun non formal (di masyarakat). Secara resmi dan tertulis bupati belum mendorong upaya-upaya formal agar masyarakat terdidik secara politik.

Melalui interaksinya dengan masyarakat, bupati ingin membangun kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai orang sunda termasuk berpakaian sunda baik bagi pegawai di lingkungan Pemda Purwakarta maupun instansi lainnya. Upaya tersebut merupakan sebuah langkah untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai perannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai sunda dalam kehidupan. Hanya sebagian kecil yang memahami bahwa tindakan dan perilaku Bupati merupakan upaya untuk membangun kesadaran politik terutama kesadaran mengenai hak dan kewajibannta sebagai warga negara. Peristiwa politik mengimplementasikan kebudayaan sunda dan ditujukan agar masyarakat mengikuti praktek-praktek hidup urang sunda belum menjadi media pembelajaran bagi masyarakat awam. Bagi kelompok intelektual maupun tokoh masyarakat dan budayawan, setiap peristiwa budaya yang digagas oleh bupati, praktek hidup orang Sunda, ikat kepala merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai urang sunda.

Melalui praktek *nyunda-nya* serta kebijakan untuk berpakaian Sunda bagi PNS, Dedi mulyadi sedang membangun karakter bangsa dalam rangka persatuan bangsa serta dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa melalui keanekaragaman budaya. Bagi kelompok masyarakat yang non sunda, praktek tersebut merupakan sebuah upaya membangun keanekaragaman dan memperkenalkan kebudayaan sunda beserta nilai-nilai filosofinya. Bagi masyarakat sunda, praktek tersebut merupakan sebuah penyadaran kemabli agar masyarakat memahami secara menda-

lam dan mau mempraktekan kembali nilai-nilai sunda dalam kehidupan sehari-hari agar dipandang sebagai orang yang memiliki karakter dalam kehidupannya. Salah satu ruang lingkup pendidikan politik adalah agar masyarakat memiliki karakter dan kemandirian.

Pendidikan politik dapat berlangsung baik dalam setiap proses politik melalui peristiwa politik maupun dalam interaksi antara pemimpin politik dengan konstituennya atau melalui konsultasi. Ruang lingkup pendidikan politik secara makro meliputi setiap aspek kehidupan tidak hanya kaitannya dengan peristiwa politik baik dalam bentuk koordinasi, konsultasi, penyediaan sarana prasarana maupun materi pendidikan politik. Undang-Undang no 2 Thn 2008 tentang Partai Politik dalam Bab XIII pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa:

Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan sebagai berikut:

- (a) meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- (b) meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
- (c) meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka persatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bupati Purwakarta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Purwakarta akan hak dan kewajiban masyarakat Purwakarta dengan selalu mengingatkan kepada masyarakat Purwakarta dalam proses politik. Melalui pemilihan camat secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Purwakarta adalah salah satu bentuk mendorong pendidikan politik bagi masyarakat Purwakarta. Dengan pemilihan lurah secara serentak, Bupati Purwakarta mengharapkan warga ikut berpartisipasi secara penuh dalam proses politik. Harapan diadakan secara serentak pemilihan lurah di Kabupaten Purwakarta Bupati Purwakarta mengharapkan masyarakat akan mengingat bahwa hari tersebut adalah hari demokrasi bagi warga Purwakarta dan seluruh warga Purwakarta ikut serta turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan acara tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik melalui peristiwa politik yang dilakukan Bupati Dedi Mulyadi terhadap masyarakat Purwakarta.

Setiap gagasan, ide maupun prakteknya perlu dikritisi agar dihasilkan pengetahuan kritis yang dapat mendorong perbaikan secara terus menerus. Tidak semua ide, pikiran maupun perilaku bupati tidak mencerminkan kebenaran. Ide, pikiran dan perilaku adalah objek perdebatan termasuk mengenai visi dan

misinya dalam pendidikan politik. Tujuan perdebatan itu sendiri tetap dalam kerangka ilmiah yang ditujukan untuk menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang diperuntukan bagi perbaikan pendidikan politik terutama bagi generasi muda melalui kepemimpinan sunda.

Bupati kurang membuka dialog dengan konstituennya atau dengan kelompok yang kontra dengan kebijakannya melalui diskusi atau komunikasi dua arah. Dialog hanya dilakukan melalui simbol-simbol. Sebagai contoh penentangan terhadap keberadaan patung-patung direspon dengan menerbitkan buku yang mengetengahkan dan menjelaskan apa arti berhalal sebenarnya". Melalui Buku tersebut Bupati ingin menegaskan kebenaran pendapat dan kebijakannya tanpa membuka ruang komunikasi. Sebagian masyarakat penentangannya tidak memiliki budaya menulis pada saat ingin mengargumentasikan penolakan maupun perbedaan argumentasinya. Melalui buku, Dedi Mulyadi ingin menunjukkan kebenaran pendapatnya serta kekuasaannya sebagai seorang bupati. Hal ini dapat dilihat dari tulisan-tulisannya yang cenderung pragmatis dan hanya menitikberatkan pada kebenaran empiris dan pragmatis. Melalui bukti-bukti empiris yang menunjukkan kebenaran dari kebijakannya seperti penataan ruang kota yang lebih asri dengan ornamen sunda, atau patung yang memiliki makna filosofi bupati sebenarnya sedang berdialog dengan penentangannya.

Kredibilitas, sikap positif, dan konsistensi merupakan landasan utama bagi seorang pemimpin. Kepemimpinan yang konsisten dengan apa yang diucapkannya akan cenderung dipercaya oleh masyarakat bahwa setiap kebijakannya ditujukan sesuai dengan ucapannya. Disisilain pertimbangan politik Bupati Purwakarta memiliki konsistensi dalam mendorong kemandirian ekonomi serta kemandirian berpolitik masyarakat terutama di pedesaan. Upaya membangun karakter bangsa yang berbudaya sunda diwujudkan secara konsisten menampilkan simbol-simbol sunda baik dalam keseharian maupun kebijakannya. Konsistensi akan mendorong meningkatnya dukungan terhadap apa yang menjadi visi seorang pemimpin termasuk dalam pendidikan politik.

Patut disadari bahwa tumbuh kembangnya profil tokoh-tokoh politik sunda seperti yang dicita-citakan para tokoh sunda dalam pentas nasional biasanya sangat berkaitan erat dengan setting psikososial masyarakat yang mendukungnya. Melalui interaksinya dengan masyarakat dan mencitrakan diri sebagai orang yang konsisten dengan apa yang diucapkannya, Bupati Purwakarta sedang melakukan pembelajaran nilai-nilai sunda kepada masyarakatnya. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, budaya sunda tetap bermakna sebagai landasan hidup yang menarik untuk dikaji ulang lebih mendalam adalah seputar perbedaan nuansa warna zaman dalam proses kemunculan para

pemimpin sunda pada masa pra islam dengan saat ini, termasuk para politisi dengan kondisi masyarakat yang semakin heterogen. Pro dan kontra adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang terpenting adalah bagaimana membangun diskursus yang dapat meningkatkan kesadaran mengenai makna nilai-nilai sunda dalam kehidupan. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat memahami nilai tersebut dan menerapkannya di rumah sebagai enkulturasi nilai-nilai sunda sejak dini.

Kesederhanaan, pragmatis (hanya bersumber pada kebenaran empirik) seperti dapat dilihat dari pandangannya yang berorientasi pasar, kecerdikannya sebagai pemimpin yang meniti karier politik dari bawah sebagai aktivis coba ditransformasikan kepada konstituentnya melalui interaksi dan komunikasi. Bupati Dedi Mulyadi memiliki keyakinan terhadap budaya sunda yang tinggi serta pendirian yang teguh oleh karena itu ada kharisma yang tercermin dari seorang Dedi Mulyadi terlebih ditengah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dengan cara berpikir yang belum rasional. Kharisma yang disebabkan daya tarik sundanya menyebabkannya dipandang sebagai salah satu bupati yang konsisten dengan budaya sunda.

Visi dan Misi serta Tujuan Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, visi bupati untuk mendorong kemandirian serta tanggung jawab melestarikan budaya Sunda serta mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata tercermin dalam visinya yaitu "Purwakarta Berkarakter". Untuk mewujudkan visi "Purwakarta Berkarakter" Dedi Mulyadi mentransformasikan nilai-nilai kesundaan dalam kehidupan sehari-hari. Guna menjalankan visi dan misinya dalam pendidikan politik bupati memiliki kecenderungan untuk berperilaku *transending totaliter*, terutama dalam mengimplementasikan gagasan, ide dan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai sunda kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kurniasih (2010) dikutip dari Surya (2010, hlm. 74) yang mengatakan "mengenai kepemimpinan sunda, secara umum dapat digambarkan dengan ciri-ciri *transending totaliter*, *transforming entrepreneurship*, dan *transaksional kharismatis*".

Kepemimpinan *transending totaliter* adalah kepemimpinan yang secara total tidak memberikan kesempatan berdialog dalam proses peleburan nilai-nilai kepemimpinan baik kedalam sistem nilai masyarakat maupun struktur kepemimpinan. Pemimpin melakukan indoktrinasi terhadap setiap aspek kehidupan bawahannya melalui simbol sundanya. Sebagai contoh masyarakat yang takut mengungkapkan bagaimana kepemimpinan bupati saat ini, keengganan seorang PNS mengkritisi kepemimpinan Dedi Mulyadi atau membangun tata ruang kota yang menampilkan penataan sesuai dengan nilai-nilai sunda. Hal ini ditujukan

agar masyarakat melihat bukti kebenaran filosofi tersebut kemudian tumbuh kesadarannya tentang kemandirian, budaya sunda, hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Kepemimpinan dan pendidikan politik tidak dapat dipisahkan. Melalui pendidikan politik, seorang pemimpin dapat mengelola kepentingan politiknya dalam upaya membangun visi dan misinya. Pendidikan politik yang diarahkan untuk kepentingan pencapaian visi seorang pemimpin tidak salah sepanjang visinya didasarkan pada upaya membangun masyarakat madani. Pemimpin yang mendorong agar masyarakat sadar politik, berpartisipasi dalam pemilu, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembangunan adalah pemimpin yang memiliki visi dan kredibilitas. Pendidikan politik merupakan sebuah proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan termasuk budaya sunda. Hanya pemimpin yang memiliki integritas, konsistensi, kredibilitas serta bersikap positif terhadap budaya sunda yang dapat menyelenggarakan pendidikan politik di masyarakatnya.

Visi Bupati untuk mendorong kemandirian serta tanggung jawab melestarikan budaya sunda serta mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata tercermin dalam visinya yaitu "Purwakarta Berkarakter". Partisipasi tidak hanya diartikan terlibat dalam peristiwa politik seperti pemilu. Partisipasi diartikan dalam kerangka yang lebih luas seperti terlibat dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan-keputusan politik, kesadaran sebagai orang sunda, partisipasinya dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan, kemandirian budaya serta ekonomi dan membangun karakter bangsa merupakan penjabaran dari visi seorang bupati dalam rangka mewujudkan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya.

Pendidikan politik tidak hanya ditujukan agar masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Melalui pendidikan politik masyarakat belajar memahami tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepemimpinan yang *mupreruk* (membujuk dan menentramkan hati), seyogianya mampu membujuk dan menentramkan hati dengan cara menumbuhkan semangat kerja. Pendapatan yang diperoleh merupakan sumber pajak dan pada saat yang sama masyarakat disadarkan mengenai kewajibannya membayar pajak. melalui cara agar kembali kea lam sunda, Dedi Mulyadi ingin menunjukkan kewajiban masyarakat terhadap budayanya dan lingkungannya.

Dedi Mulyadi ingin agar masyarakat menyadari bahwa sistem kepercayaan spiritual tradisional Sunda keselarasan hidup dengan alam. Masalah pendidikan politik (*political education*) bagi suatu bangsa dan negara merupakan proses pembinaan, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan yang

diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan. Dedi mulyadi ingin mengaskan bahwa pembinaan nilai dan norma budaya sunda merupakan sebuah keharusan serta diselenggarakan dalam lingkungan pendidikan yang sangat luas yaitu alam, masyarakat serta interaksi yang ada antara pemimpin dengan masyarakatnya. Pendidikan politik agar masyarakat sadar dengan keadaannya dapat berlangsung dimana saja dan kapan saja.

Sebagai bawahan atau konstituen, masyarakat Purwakarta diarahkan oleh Bupati agar mampu menerjemahkan apa yang menjadi perintah tanpa merasa diperintah seperti ungkapan *mun jadi rahayat, kudu taraje nanggeuh, dulang titande* (siapa menjalankan perintah). Perintah seorang bupati terkesan otoriter karena kurang membuka dialog atas kebijakan-kebijakannya walaupun dikemudian harus diketahui bahwa kebijakan tersebut benar secara praktis dan pragmatis. Dialog tidak diartikan sebagai upaya untuk memaksa atau melakukan persuasif agar orang lain atau masyarakat menyadari kebijakannya. Dialog merupakan sebuah proses untuk saling belajar satu sama lain mengenai objek kehidupannya. Bupati melalui dialog belajar untuk memahami secara mendalam karakteristik masyarakatnya, disisi lain masyarakat melalui dialog diarahkan untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai orang sunda.

Visi dan misi kepemimpinan sunda dalam konteks pendidikan politik Bupati Purwakarta adalah agar terwujudnya "Purwakarta Berkarakter". Oleh karena itu kepemimpinan struktural maupun kepemimpinan kultural yang ingin diemban Bupati Purwakarta merupakan kepemimpinan yang berfungsi sebagai penggerak. Dinamisator dan koordinator dari pengelolaan sumber-sumber daya yang digunakan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kesundaan, Bupati perlu membuat visi dan misinya untuk membuat "Purwakarta Berkarakter" menarik masyarakat agar terlibat dalam perwujudan misi dan visinya. Oleh karena itu kepemimpinannya akan jauh lebih sulit, harus lebih elastis, pragmatis serta penuh dengan nilai-nilai yang serba filosofis Sunda.

Untuk itu, perilaku kepemimpinan tokoh yang berusaha mewujudkan visi dan misinya harus memiliki integritas, visioner, konsisten, serta kredibel baik dalam ucapan maupun tindakannya. Apa yang diucapkan dan menjadi tindakan keseharian merupakan inspirasi bagi masyarakatnya untuk terlibat dalam upaya membangun "Purwakarta Berkarakter". Setiap anggota masyarakat tergerak untuk mengimplementasikan nilai-nilai filosofi sunda. Ditengah masyarakat yang heterogen maka gaya kepemimpinannya memiliki fleksibilitas, pragmatis dan filosofis dalam satu bentuk yaitu pemimpin sunda.

Sampai saat ini, masalah kepemimpinan masih sering dibahas adalah kualitas pribadi intrinsik

pemimpin individual tokoh sunda itu sendiri, melalui konsistensinya dan komitmennya gaya kepemimpinan sunda yang ditampilkan oleh bupati menunjukkan bahwa kualitas tersebut dapat terwujud. Visi, misi dan tujuan untuk mendidik masyarakat dalam berpolitik terutama dalam upaya mewujudkan "Purwakarta Berkarakter" dapat terwujud dalam kepemimpinan yang memiliki otoritas, yaitu suatu kekuasaan diberikan melalui sumber legitimasi resmi (demokrasi/pemilukada), dan legitimasi kepemimpinan kultural diperoleh karena ada pengakuan oleh tokoh masyarakat sunda (sesepuh) yang mewakili sistem sosial masyarakat sunda.

Pemimpin yang berhasil adalah para pemimpin yang pandai dalam mengelola suasana hati masyarakatnya, berbakat melakukan transformasi budaya dan nilai serta menggunakan kombinasi berbagai kemampuan kejiwaan yang disebut kecerdasan emosi, sadar diri dan berempati terhadap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mampu membaca dan mengatur emosi dirinya sementara secara intuitif menangkap bagaimana perasaan masyarakatnya dan denyut aspirasi warganya.

Kesimpulan

Pendidikan politik yang mengandung kesatuan antara dimensi ideal dan dimensi manifest prinsip berpancasila adalah pendidikan politik yang tergambar dalam perilaku "nyunda". Pendidikan politik ditujukan agar masyarakat berpartisipasi politik dalam pembangunan. Pendidikan yang diselenggarakan bersifat non formal baik melalui peristiwa yang ditujukan untuk mendorong masyarakat agar terlibat dalam upaya mengimplementasikan budaya Sunda maupun kebijakannya untuk mendorong kemandirian. Temuan penelitian adalah perilaku memilih pemimpin masyarakat Purwakarta merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, baik yang melekat pada diri pemilih baik secara rasional atau pun irasional. Sebagian besar masyarakat Purwakarta tidak mempersoalkan pemimpinnya menggunakan gaya atau landasan filosofi Sunda. Masyarakat menginginkan pemimpin yang mampu mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari terutama masalah ekonomi. Secara umum kepemimpinan Sunda dalam upaya pendidikan politik dipraktikkan secara non formal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa:

1. Sikap kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik Bupati Purwakarta memiliki sikap positif terhadap pendidikan politik. Hal ini dapat dilihat dari upayanya untuk membangun kemandirian ekonomi, mendorong kebanggaan identitas sebagai orang Sunda, kewajiban untuk meningkatkan produktivitas dengan pemanfaatan sumber daya alam lokal serta bagi pemilih pemula agar memilih karena alasan rasional. Dengan

menggunakan pola kepemimpinan transformasional Bupati Purwakarta mentransformasikan nilai-nilai kesundaan pada masyarakat Purwakarta sebagai bagian dari proses pendidikan politik. Dengan pola kepemimpinan transformasional Dedi Mulyadi mampu mempengaruhi, menginspirasi serta memotivasi masyarakat Purwakarta untuk menjaga dan melestarikan budaya Sunda yang merupakan ciri dari kepemimpinan Sunda.

2. Kredibilitas kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik yang diperankan oleh Bupati Purwakarta bahwa Bupati dinilai memiliki kredibilitas untuk mendorong pendidikan politik bagi warganya. Proses transformasi nilai-nilai kesundaan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi menguatkan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin Sunda dimata masyarakat. Karakteristik sebagai pemimpin yang pésok (memikat hati atau reueus/bangga), mampu memikat hati bawahannya dan merupakan kebanggaan juga bagi bawahannya terutama orang Sunda. Bupati dinilai memiliki jiwa mupreruk (membujuk dan menentramkan hati). Dengan kredibilitas yang dimilikinya, masyarakat percaya bahwa Dedi Mulyadi dapat mendorong pendidikan politik bagi warganya terutama kesadaran pada warganya untuk mengimplementasikan budaya Sunda dan membangun kemandirian dengan kembali ke alam.
3. Konsistensi kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta memperlihatkan bahwa Bupati Purwakarta memiliki konsistensi dalam mendorong pendidikan politik masyarakat Purwakarta dengan menggunakan nilai-nilai kesundaan. Upaya membangun karakter bangsa yang berbudaya Sunda diwujudkan dengan secara konsisten menampilkan simbol-simbol Sunda baik dalam keseharian maupun kebijakannya. Dedi Mulyadi mentransformasikan nilai-nilai kesundaan secara konsisten kepada masyarakat Purwakarta sebagai bagian dari pendidikan politik.
4. Visi dan misi serta tujuan kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik yang dirumuskan oleh Bupati Purwakarta bersama para stakeholder menggambarkan bahwa visi Bupati Purwakarta untuk mendorong kemandirian serta tanggung jawab melestarikan budaya Sunda serta mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata tercermin dalam visinya yaitu "Purwakarta Ber-karakter". Guna menjalankan visi dan misinya dalam pendidikan politik bupati memiliki kecenderungan untuk berperilaku transending totaliter dan otoriter terutama dalam mengimplementasikan gagasan, ide, dan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Sunda kepada masyarakat. Hal ini ditujukan agar masyarakat melihat bukti kebenaran filosofi tersebut kemudian tumbuh

kesadarannya tentang kemandirian, budaya Sunda, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara.

Daftar Pustaka

- Afif, F. (2013). *Kepemimpinan Strategik*. Bandung: Asian Plan Consult. Publishing House.
- Cresswell, Jhon. (2012). *Educational Research*. Boston: Peason Education, Inc
- Heenan, C.G. (2001). *From Protagonist To Pragmatist: Political Leadership In societies in transition*. Northern Ireland: University of ulster/united nations university press.
- Kouzes, J dan Postner, B. Z. (2012). *Leadership Challenge, 5th Edition*. San Fransisco: Jossey Bass.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Robbins. (2006). *Perilaku Organisasi*. (alih bahasa Molan). Jakarta: Indeks.
- Sajogyo, Pujiwati. S. (2011). *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajahmada Press
- Surya, P. (2010). *Kepemimpinan Perempuan Bernilai Kesundaan di Bidang Pendidikan*. Jurnal Manajemen Pendidikan. Nomor: 02/Th VI/Oktober/, hlm.1-15.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Wibisono. (2006). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Diadit Media
- wikipedia.org
- www.garutkab.go.id [diakses 26 Agustus 2013]